



**SAMBUTAN**  
**DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**  
**DAN EKOSISTEM**  
**Pada Acara**  
**Workshop Verified Conservation Area (VCA)**  
**Jakarta, 24 September 2018**

---

Yth. Dr. Francis Vorhies – Direktur Earthmind

Yth. Mr. Arthur Eijs – Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan  
Hidup Belanda

Yth. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu dan  
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Yth. Para Direktur lingkup Ditjen KSDAE

Yth. Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur

Yth. Kepala BKSDA Bengkulu

Yth. Rekan-rekan Direktur LSM dan

Para hadirin peserta workshop yang berbahagia

***Assalamu'alaikum Wr Wb.***

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Mengawali acara ini terlebih dahulu marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmatNya kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri Workshop Verified Conservation Area (VCA). Workshop ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat penyelamatan dan

perlindungan areal penting di luar kawasan konservasi hektar demi hektar.

Workshop ini diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial KLHK, Earthmind dan Tropenbos Indonesia.

***Hadirin yang saya hormati,***

Salah satu upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia adalah melalui penetapan kawasan konservasi. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa masalah yaitu kawasan konservasi yang ada tidak dapat menampung satwa yang ada di dalam karena adanya kerusakan habitat, terbukti hampir 80% satwa di lindungi berada di luar kawasan konservasi. Untuk itu pengelolaan ekosistem penting yang berada di luar kawasan konservasi yang dikenal sebagai *kawasan ekosistem esensial* menjadi sangat penting.

Kawasan Ekosistem Esensial adalah kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar kawasan yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi/dikonservasi. Upaya perlindungan ekosistem esensial merupakan tanggung jawab bersama para pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, sector swasta, lembaga pendidikan, lembaga non pemerintah dan juga masyarakat mengingat ekosistem esensial dapat berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan/budidaya.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, perlu dikembangkan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan untuk menjaga kelestarian demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

***Hadirin yang saya hormati,***

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan harus didasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Laporan Brundtland dari PBB, 1987)

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 PBB menerbitkan resolusi yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan dan telah menentukan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terdiri dari 17 tujuan dan 169 capaian yang terukur dan tenggat waktu hingga tahun 2030 sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Masalah pembangunan sangat erat kaitannya dengan masalah lingkungan, ekonomi dan sosial sehingga paradigma pembangunan berkelanjutan perlu mengantisipasi masalah-masalah yang timbul terkait dengan kegiatan pembangunan lingkungan, ekonomi dan sosial. Selama ini, masalah lingkungan masih seringkali diletakkan di bawah kepentingan ekonomi dan sosial sehingga masih banyak terjadi kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan/atau udara, kerusakan kualitas tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim dan sebagainya.

### ***Hadirin yang saya hormati,***

Konsep menjaga sumber daya bagi generasi masa depan merupakan salah satu elemen penting yang membedakan kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan lingkungan yang sifatnya tradisional. Kebijakan konservasi di Indonesia selama bertahun-tahun yang lalu pada dasarnya cenderung belum melibatkan masyarakat dan tidak mengizinkan adanya aktifitas lain selain konservasi. Dalam masa-masa itu, dari aspek politik ekonomi, konservasi dipandang sebagai hambatan terhadap pembangunan sehingga kurang didukung, bahkan ditolak banyak pihak. Akibatnya, konservasi tidak dapat diwujudkan bersamaan dengan proses pembangunan dan aktifitas masyarakat.

Namun saat ini kami telah mengembangkan cara baru mengelola kawasan konservasi yaitu membangun Learning Organization yang dilakukan dengan pelibatan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan konservasi. Cara baru tersebut juga sebagai upaya untuk menemukan model kelola kawasan konservasi yang didasarkan pada nilai – nilai adat dan budaya setempat, perubahan geopolitik, sosial ekonomi yang terjadi di sekitar kawasan konservasi sebagai dampak dari pembangunan di berbagai bidang selama 47 tahun. Saat ini masyarakat berperan penting sebagai pelaku utama dalam masa depan konservasi.

### ***Hadirin yang berbahagia,***

Mengingat bahwa sebagian besar keanekaragaman hayati Indonesia masih berada di luar kawasan konservasi, maka peran Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) sangatlah penting. Saat ini Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi seluas 27,2 juta ha dari ± 104 juta

ha ekosistem penting (indikatif). Sedangkan kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan seluas ± 723.788,14 ha yang terdiri dari Taman Kehati, Habitat dan Koridor Hidupan Liar serta Karst dan Mangrove.

Namun demikian, pengelolaan Kawasan ekosistem esensial masih menghadapi permasalahan diantaranya 1) dana yang belum mencukupi, sehingga VCA bisa dijadikan alternative pendanaan berkelanjutan KEE; 2) kapasitas kelembagaan KEE yang belum memadai sehingga masih diperlukan pendampingan dalam pengelolaan KEE; 3) Pengelolaan KEE dalam bentuk forum kolaborasi sangat rentan dalam keberlanjutannya, untuk itu diharapkan program VCA dapat berperan serta dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan KEE dalam hal pendanaan dan pengembangan kelembagaan.

Demikian yang dapat saya sampaikan, dengan mengucapkan Bismillahi rahmani rahim Workshop Verified Conservation Area saya nyatakan dibuka.

Selamat mengikuti workshop. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Jakarta, 24 September 2018

Ttd

Ir. Wiratno, MSc.  
Direktur Jenderal KSDAE

# 10 Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi



1 Masyarakat Sebagai Subyek Pengelolaan



2 Penghormatan pada HAM



3 Kerja Sama Lintas Eselon / KLHK



4 Kerja Sama Lintas Kementerian



5 Penghormatan Nilai Budaya dan Adat



6 Multilevel Leadership



7 Scientific Based Decision Support System



8 Resort (Field) Based Management



9 Reward and Mentorship



10 Learning Organization

- Ir. Wiratno, M.Sc. -  
DIREKTUR JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN EKOSISTEM



Saran, masukan, aduan,  
untuk perbaikan kelola  
Kawasan Konservasi,  
manajemen hidupan liar,  
kemitraan dengan masyarakat  
dan mitra lainnya, jangan  
ragu hubungi kami.

Call Center  
**0822 9935 1705**



Direktorat Jenderal KSDAE



[www.kisdae.meritkgo.id](http://www.kisdae.meritkgo.id)



[datakonservasi@gmail.com](mailto:datakonservasi@gmail.com)



@ditjenkisdas



@biodiversity\_of\_indonesia



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

